

BAB II

INVASI AMERIKA SERIKAT KE AFGHANISTAN PERIODE 2001-2021 DAN KEBIJAKAN BANTUAN LUAR NEGERI AS MELALUI USAID (UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT) DAN UNAMA (UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN)

Tragedi 9/11 menjadi peristiwa yang mengubah *landscape* kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Afghanistan. Presiden George W. Bush melancarkan operasi *Enduring Freedom* untuk menumpas kekuatan Taliban menggunakan kekuatan militer karena keterkaitan kelompok ini dengan Osama Bin Laden. Perang akibat invasi yang dilakukan AS menyebabkan kehancuran bagi warga Afghanistan akibat konflik berkepanjangan sehingga membuat Afghanistan dikategorikan sebagai *failed and fragile states*.

Amerika Serikat yang sadar akan konsekuensi perang yang membuat jatuhnya korban jiwa memiliki tanggung jawab moral untuk mereparasi keadaan di Afghanistan sehingga menginisiasikan kebijakan bantuan luar negeri melalui USAID (*United States Agency for International Development*). Bab ini akan menjelaskan deskripsi sejarah invasi AS ke Afghanistan, Taliban sebagai faksi yang berpengaruh dan bantuan kemanusiaan yang dialokasikan untuk mendanai kesejahteraan warga Afghanistan

2.1 Invasi Amerika Serikat ke Afghanistan Periode 2001-2021

2.1.1 Invasi dan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Ke Afghanistan Era Presiden George W. Bush

Presiden George W. Bush merupakan Presiden ke-43 Amerika Serikat dari Partai Republik yang memenangkan Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2000 mengalahkan Mantan Wakil Presiden AS, Al Gore (Hilleren, 2008). Presiden Bush dikenal diawal kepemimpinannya yang sudah harus menghadapi situasi krisis besar bagi Amerika Serikat yakni tragedi 9 September 2001 atau dikenal dengan tragedi 9/11 (Hileren, 2008, p. 120). Sebagai Komandan Utama Angkatan Perang Amerika Sersikat, Presiden Bush dituntut publik AS untuk tanggap dalam memberikan respons akibat tragedi 9/11 yang berujung dengan dimulainya perang antara Amerika Serikat dan Afghanistan di tahun 2001 (Hileren, 2008, p.132).

Bush dikenal sebagai Presiden yang memainkan retorika untuk memusuhi kelompok islam garis keras yang terafiliasi dengan kelompok terorisme sehingga doktrin yang dikenalkan Bush didalam “*War on Terror*” banyak diinterpretasikan sebagai penyebab meningkatnya *islamophobia* di Amerika Serikat setelah 9/11 (Lee, 2017). Hal ini selaras dengan berjalannya perang di Afghanistan dimana Bush selalu menggunakan frasa “Islam” sebagai suatu agama di setiap pidato atau *statement* publiknya ketika berbicara tentang pengiriman militer Amerika Serikat di Afghanistan dan Iraq (Lee, 2017, p.5).

Presiden George W. Bush menginisiasi langsung rencana Amerika Serikat dalam operasi *War on Terror* dan operasi *Enduring Freedom* yang bertujuan untuk mengerahkan alat dan persenjataan udara dengan peresisi dan intensitas tinggi serta menerapkan operasi militer via darat melalui *Special Operation Forces* (SOF) dalam melakukan serangan awal ke markas Taliban pada 7 Oktober 2001 (Ismadi et al., 2019). Operasi ini dilakukan Pemerintahan Bush sebagai respons dari

serangan 9/11 pada 11 September 2001 yang dilancarkan oleh kelompok teroris Al Qaeda. Peristiwa mencekam bagi publik Amerika Serikat terjadi salah satunya pada peristiwa 4 pembajakan pesawat oleh Al Qaeda antara lain (Fox News, 2015):

- 1) *American Airlines Flight 11* yang menabrak bagian utara gedung World Trade Center.
- 2) *United Airlines Flight 175* yang menghantam bagian selatan gedung *World Trade Center*.
- 3) *American Airlines Flight 77* yang jatuh di area Gedung Pentagon.
- 4) *United Airlines Flight 93* yang jatuh di area lapangan di Pennsylvania dimana menurut laporan pesawat ini direncanakan untuk menyerang Gedung Putih namun gagal karena perlawanan dari penumpang dalam pesawat (Riley, 2008).

Rentetan peristiwa mencekam bagi Amerika Serikat ini memakan korban jiwa sebanyak 2,977 yang tewas di *New York, Washington DC, dan Pennsylvania* meliputi warga negara Amerika Serikat dan mancanegara dan memaksa Pemerintahan Bush untuk melakukan respons tanggap terhadap peristiwa ini (BBC, 2021). Pimpinan Al Qaeda, Osama Bin Laden dituduh Pemerintahan Bush dilindungi oleh kelompok Taliban yang memberikan fasilitas perlindungan persembunyian bagi Osama Bin Laden di Afghanistan (Ismadi et al., 2019, p.13).

Pemerintahan Bush juga menggunakan media massa dalam memengaruhi opini publik untuk mendukung kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam melakukan invasi ke Afghanistan (Permadi, 2012). Strategi Presiden Bush

dilakukan demi mengkonstruksi dukungan publik Amerika Serikat dan Internasional dalam mendukung upaya penumpasan terorisme di Taliban (Permadi, 2012, p.150). Sebelum awal operasi militer dilancarkan, Amerika Serikat pertama kali lewat Pemerintahan Bush, menuduh Taliban bekerjasama untuk menyembunyikan pemimpin Al-Qaeda, Osama Bin Laden sehingga Presiden Bush melakukan ultimatum politik dan negosiasi ke Taliban untuk menyerahkan Bin Laden atau invasi akan dilakukan (Malkasian, 2021, p.87). Taliban kemudian berkonsultasi dengan konsul akademisi dan pemuka agama di Kabul dan secara tegas menyatakan sikap bahwa jihad akan dilakukan ketika AS melakukan invasi ke negara mereka (Malkasian, 2021, p.90). Pasalnya, Amerika Serikat di era kepemimpinan George W. Bush juga menyetujui resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa pemerintah Taliban telah melindungi Osama Bin Laden sehingga pemerintah Taliban sudah dianggap tidak demokratis terhadap masyarakatnya (Sinapa, 2012). Invasi Amerika Serikat di Afghanistan juga dilakukan berdasarkan Mandat Dewan Keamanan PBB lewat Resolusi No.1386 terkait pembentukan *International Security Assistance Force* (ISAF) yang bertujuan untuk mengerahkan pasukan keamanan di Afghanistan dan melindungi warga Afghanistan dari ancaman Taliban dan pengaruh terorisme (Sinapa, 2012, p. 45).

Kebijakan *War on Terror* yang diinisiasi oleh Amerika Serikat di tahun 2001 telah mendukung persepsi publik internasional bahwa ancaman terorisme merupakan hal yang berbahaya bagi keamanan dunia karena aksi dan aktivitas dari kelompok-kelompok terorisme berseberangan dengan konsepsi kebebasan

demokratis dan kemanusiaan (Siagian & Pratiwi, 2008). Ancaman dari kelompok teroris dimaknai sebagai aktivitas *non-state actor* yang dapat menimbulkan kekacauan dan kejahatan sehingga menyebabkan ketidakstabilan politik bagi masyarakat tempat operasi terorisme dilakukan (Siagian & Pratiwi, 2008, p.163). Makna dari aksi terorisme yang muncul di permukaan telah menjadi dasar bagi negara seperti Amerika Serikat dalam memusatkan perang di dekade 2000-an khususnya di daerah Timur Tengah utamanya pada penumpasan Al-Qaeda setelah penyerangan 11 September 2001 (Azria & Ramayani, 2022).

Rencana perang pertama dilakukan oleh CIA (*Central Intelligence Agency*) yang mengirim '*paramilitary teams*' untuk mengkomodir tim spesial militer AS untuk menyerang lewat serangan udara dan kemudian sebanyak 2,000 pasukan '*US Marine Expeditionary*' memasuki medan perang melalui kawasan laut (Malkasian, 2021, p.90). Operasi ini lalu dinamakan "*Operation Enduring Freedom*" yang dimulai pada 7 Oktober 2001. Serangan pertama dilakukan melalui misil udara yang ditargetkan menghancurkan lapangan udara Taliban, infrastruktur sistem komunikasi Taliban, markas besar para Menteri Taliban dan rumah dari Pemimpin Taliban pada saat itu "Mullah Omar" (Malkasian, 2021, p.95).

Perang di awal ini sampai menghabiskan 17 jam berturut-turut serangan udara hingga membuat kerusakan parah bagi sebagian besar pasukan Al-Qaeda dan Taliban walaupun pada akhirnya serangan yang dilancarkan ini belum mencapai misi utama AS dalam menangkap dan membunuh pimpinan Al-Qaeda, Osama Bin Laden serta para pimpinan utama Taliban (Walling, 2015). Target utama dari "*Operation Enduring Freedom*" antara lain untuk membunuh: Osama Bin Laden

(Pemimpin Utama Al-Qaeda), Ayman al-Zawahiri (Wakil dari Osama Bin Laden), Khalik Shaik Mohammed (Arsitek dari penyerangan 9/11), dan Mullah Omar (Pemimpin Utama Taliban) (Tucker-Jones, 2020). Pemberlakuan interogasi dan penyiksaan bagi individu yang diinvestigasi terkait dengan kelompok teroris atau yang terlibat dalam serangan 9/11 dibawah Pemerintahan George W. Bush juga diperbolehkan dengan istilah “*alternative for set of procedures in capturing terrorism*” (Schmitt, 2009).

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bagian dari usaha militer dalam melaksanakan strategi perang untuk mencegah meluasnya pengaruh terorisme di Amerika Serikat dan bagi Amerika Serikat, membangun kawasan Afghanistan yang lebih stabil hanya dapat dilaksanakan jika Afghanistan harus terlindungi dari pengaruh Taliban dan terorisme (Dale, 2011). Dukungan domestik di Amerika Serikat dalam melancarkan operasi militer ke Afghanistan juga mendapat dukungan politik dari kongres yang menyetujui undang-undang bernama “*USA Patriot Act*” yang mengatur tentang respons tanggap negara terhadap istilah dan aksi-aksi terorisme didukung dengan pengesahan “*Foreign Intelligence Surveillance Act*” yang mengatur tentang investigasi dan legitimasi hukum bagi pemerintah untuk melacak telekomunikasi dan *e-mail* internasional yang masuk tanpa harus melakukan izin ke pengadilan (Bailey & Immerman, 2015). Melalui proses politik dan kebijakan internasional yang dilakukan oleh Presiden Bush dalam merespons *War on Terror*, Amerika Serikat menggunakan empat fase operasi dasar dalam melancarkan serangan ke Taliban dan Afghanistan (Walling, M G, 2015) :

1. Fase pertama: Mempersiapkan dan membangun kekuatan untuk menyokong opsi-opsi militer dalam membangun aliansi dan mempersiapkan sumber daya peperangan.
2. Fase kedua: Melaksanakan operasi kombatan dan melanjutkan operasi militer dengan tujuan untuk misi kemanusiaan.
3. Fase ketiga: Melakukan operasi militer di Afghanistan serta melanjutkan pembentukan koalisi perang.
4. Fase keempat: Membangun kapabilitas koalisi dengan para mitra perang untuk mencegah munculnya kekuatan terorisme dan tetap melancarkan serangan dengan dalil untuk mendukung operasi misi kemanusiaan sehingga serangan bertubi-tubi dari AS ke Afghanistan direncanakan berlangsung selama 3-5 tahun lamanya.

Seiring dengan meluasnya eksistensi Taliban yang memasuki wilayah pegunungan Afghanistan, dan juga menempatkan beberapa pasukan di perbatasan negara tetangga Pakistan, Amerika Serikat bekerjasama dengan NATO dalam pembentukan *International Security Assistance Force* (ISAF) yang dibentuk sebagai operasi pasukan bantuan keamanan di Afghanistan yang dipimpin oleh NATO (Tucker-Jones, 2020, p.98). Operasi militer yang dilancarkan AS dan NATO utamanya untuk menumpas Taliban yang memiliki tiga kategori pasukan antara lain (Tucker-Jones, 2020):

1. Pejuang ekstrimis Taliban yang memiliki misi untuk melindungi Taliban dari segala bentuk serangan melalui strategi *hardcore*.

2. Pejuang jihadis yang berjuang atas nama jihad di dalam peperangan yang melibatkan Taliban dan Afghanistan.
3. Pejuang 'sepuluh dollar' Taliban yang berjuang praktis hanya demi kepentingan uang.

Perang melawan terorisme yang diinisiasi Presiden Bush diawal juga mendapat dukungan masif dari publik Amerika Serikat dengan kenaikan drastis efek elektoral dan *approval rating* untuk Presiden Bush yang pada tanggal 10 September 2001 atau sehari sebelum kejadian *9/11* terjadi berada di angka 51% naik menjadi 86% menurut data pada 15 September 2001 setelah Presiden Bush mendeklarasikan kegeraman dan perang terhadap Al Qaeda dan sekutu yang mendukungnya (Hetherington & Nelson, 2003). Peningkatan *approval rating* dari Bush pada masa itu sangat pesat mengalahkan angka dari Presiden Franklin D Roosevelt setelah tragedi Pearl Harbor, Presiden John F Kennedy setelah tragedi Krisis Misil Kuba dan Presiden George H.W Bush setelah Perang Gulf di tahun 1991 kendati pada masa awal kepemimpinan George W. Bush, ekonomi masih menjadi masalah utama di Amerika Serikat (Gregg, 2010).

Kejadian *9/11* merupakan tragedi kelam bagi masyarakat Amerika Serikat sekaligus menjadi kejadian bersejarah yang penting dalam rekonstruksi urusan kemanusiaan dunia setelah AS mendeklarasikan kebijakan invasi ke Afghanistan (Graham et al., 2004). Dengan begitu, strategi Bush dalam *War on Terror* dan kebijakan invasi di Afghanistan juga memerlukan dukungan internasional dengan menggunakan istilah negara yang terafiliasi dengan kejadian *9/11* atau kelompok teroris seperti Taliban sebagai ancaman besar utamanya bagi kepentingan dan

keamanan Amerika Serikat (Graham et al., 2004, p.212). Hal ini selaras dengan *statement* Presiden George W. Bush dikutip pada pidatonya di Gedung Putih pada 17 September 2002:

“Finally, the United States will use this moment of opportunity to extend the benefits of freedom across the globe. We will actively work to bring the hope of democracy, development, free markets, and free trade to every corner of the world. The events of September 11, 2001, taught us that weak states, like Afghanistan, can pose as great a danger to our national interests as strong states. Poverty does not make poor people into terrorists and murderers. Yet poverty, weak institutions, and corruption can make weak states vulnerable to terrorist networks and drug cartels within their borders.” (The National Security Strategy of the United States of America, 2003)

Sejak awal, Pemerintahan Bush telah menginisiasi dukungan internasional untuk *War on Terror* dengan melakukan pendekatan politik dalam mentransfusi gagasan kerjasama internasional untuk digunakan sebagai usaha global dalam melawan aksi terorisme yang diartikan sebagai perbuatan barbarisme dan mengenalkan konsep *good versus evil* dalam perang melawan terror (Kuypers et al., 2012). *Framing* oleh Pemerintahan Bush menggunakan beberapa istilah dalam mengkonseptualisasi ancaman dari aksi terorisme, antara lain: *“good versus evil”*, *“civilization versus barbarism”*, *“the nature of the new enemy”*, dan *“the nature of the war”* untuk mengartikan ancaman dari kelompok teroris seperti Taliban bukan hanya perihal ancaman domestik tetapi ancaman berskala global (Kuypers et al., 2012, p.105).

Sejak invasi dilakukan di era Presiden Bush, Afghanistan telah menjadi salah satu negara paling miskin di dunia dengan minimnya perkembangan pembangunan infrastruktur ditambah kurangnya perkembangan sumber daya alam dan sulitnya warga Afghanistan dalam menggunakan fasilitas kesehatan sehingga membuat Afghanistan menurut data UNICEF, memiliki angka kematian khususnya bagi wanita sebesar 1,600 dari setiap 100,000 jiwa yang lahir diakibatkan konflik berkepanjangan akibat perang (Zia-Zarifi, 2004). Tiga tahun setelah invasi di Afghanistan dilakukan, level kebutuhan finansial Afghanistan untuk mendukung proses rekonstruksi yang dicanangkan Pemerintahan Bush membutuhkan setidaknya 15-20 Miliar Dolar AS tetapi realisasi anggaran yang masuk dari alur bantuan kemanusiaan berasal dari Amerika Serikat dan komunitas internasional berkisar di angka 7 Miliar Dolar AS dan dalam penerapannya hanya sekitar 4 Miliar Dolar AS yang digunakan untuk rekonstruksi Afghanistan selama lima tahun (2002-2007) sehingga ini jauh dari kebutuhan pembangunan yang menurut Pemerintah Afghanistan, angka kebutuhan rekonstruksi di Afghanistan mencapai 30 Miliar Dolar AS (Zia-Zarifi, 2004, p.6).

Di masa Pemerintahan George W. Bush, Taliban berhasil disingkirkan sejak 2002 sehingga menurut kalkulasi Amerika Serikat, transisi pergantian pemerintahan dapat dilakukan dengan memaksimalkan usaha dari PBB untuk menciptakan transisi politik dengan pemerintahan baru dibawah Presiden Hamid Karzai (Rubin, 2009). Di awal masa transisi Pemerintahan Hamid Karzai, Afghanistan sudah dilanda banyak kekacauan sehingga wilayah-wilayahnya khususnya Kabul masih mendapat perhatian lebih dari komunitas internasional dan

organisasi non-pemerintahan (Flanders, 2004). Dilihat dari aspek sosial-ekonomi, Afghanistan masih tertinggal dari negara-negara tetangga dan menjadi negara termiskin diluar negara sub-sahara Afrika ditambah dengan lemahnya efektivitas sistem pemerintahan yang berjalan membuat Afghanistan dilihat berdasarkan indikator *domestic revenue*-nya hanya mencapai \$13 per kapita untuk pemasukan warganya di tahun 2008 (Rubin, 2009, p.66). Hal ini membuat Presiden Hamid Karzai yang diperkirakan dapat membuat perubahan pada realitanya tidak membawa dampak signifikan bagi Afghanistan dapat dilihat dari terbatasnya penyimpanan energi negara, minimnya revitalisasi di sektor agrikultur, dan rendahnya iklim investasi yang hadir membuat angka pengganguran masih tinggi dibarengi dengan konflik yang tidak kunjung usai (Rubin, 2009, p.67).

Afghanistan sendiri setelah invasi yang dilakukan Amerika Serikat dikategorikan sebagai "*failed state*" atau "*fragile state*" dikarenakan perang yang terjadi akibat operasi *War on Terror* menyebabkan kerusakan bagi masyarakat Afghanistan (Pherali & Sahar, 2018). Kemunduran Afghanistan juga didukung dengan kebijakan pendidikan nasional di Afghanistan yang kurang seimbang dimana di tahun 2002, lebih dari 900,000 laki-laki dapat merasakan sekolah sementara wanita dikecualikan dalam proporsi pendidikan yang ada (Pherali & Sahar, 2018, p.245). Aksi-aksi kekerasan terorisme yang terjadi pasca invasi AS di tahun 2001 menyebabkan kehancuran besar karena menggunakan berbagai aktivitas menggunakan kekerasan demi perebutan kekuasaan yang mengubah peta kekuasaan politik di Afghanistan baik dari sisi Taliban yang menginginkan konsep islam garis keras sebagai konsepsi kehidupan masyarakat Afghanistan maupun

pemerintahan bentukan Amerika Serikat yang ingin merubah Afghanistan semakin demokratis (Siagian & Pratiwi, 2008).

Rangkaian peristiwa kekerasan di Afghanistan juga kerap berlanjut baik di tahun 2003, 2006 dan 2008 akibat pemboman dan pembakaran sekolah-sekolah dan aksi-aksi teror dari Taliban yang ingin merebut kembali kekuasaan dari pemerintahan interim bentukan Amerika Serikat yang dipimpin Hamid Karzai sehingga perebutan kekuasaan ini menyebabkan gejolak politik dan kerusakan ekonomi hebat yang berimbas langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Afghanistan pasca invasi Amerika Serikat (Siagian & Pratiwi, 2008, p.166).

Akibat dari gejolak politik yang tidak stabil di dalam negeri, rakyat Afghanistan yang menetap di luar juga terkena imbasnya ditandai dengan tewasnya dua tahanan Afghanistan di Penjara Bagram, Amerika Serikat (Tomsen, 2011). Sementara itu, lemahnya keamanan di Afghanistan juga terjadi akibat kurang hadirnya peran pemerintah dimana institusi polisi lokal daerah adalah satu-satunya institusi pemerintah di area pedalaman yang menjaga kestabilan komunitas masyarakat di Afghanistan (Tomsen, 2011, p.755).

Konsekuensi dari invasi Amerika Serikat juga menyebabkan turunnya indeks kesejahteraan wanita di Afghanistan ditandai dengan sejarah perlakuan Taliban yang sentimental dan diskriminatif terhadap kesejahteraan perempuan di Afghanistan sehingga alur bantuan kemanusiaan yang disalurkan Amerika Serikat salah satunya menyasar program khusus untuk meningkatkan partisipasi wanita di sektor kesehatan dan pelayanan pendidikan salah satunya dinamai "*Afghan Women*

Empowerment Act” (Zagoritou, 2016). Konsekuensi dari perang berkepanjangan membuat Afghanistan adalah negara yang dikategorikan miskin ditandai dengan lebih dari 80% populasi masyarakat di Afghanistan bekerja di sektor agrikultur di daerah-daerah pedalaman karena konflik yang terjadi bertahun-tahun menyulitkan pemerintah Afghanistan untuk mengintegrasikan pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas air sehingga tingkat kemiskinan di Afghanistan pasca invasi makin meningkat (Emadi, 2011).

Lemahnya pengawasan dalam sistem pemerintahan Afghanistan sejak invasi menyebabkan kekerasan berkelanjutan yang menyebabkan peningkatan kemiskinan berimplikasi pada lemahnya sektor-sektor penting di dalam kehidupan masyarakat Afghanistan, antara lain (Trani J.F, et.al, 2013):

- 1) Kebebasan dan keamanan politik yang bergejolak.
- 2) Buruknya birokrasi pemerintahan.
- 3) Kekerasan kemanusiaan berkelanjutan.
- 4) Perdagangan narkoba.
- 5) Buruknya akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.
- 6) Kualitas air yang buruk.
- 7) Endemik (infeksi virus) di daerah urban dan pedalaman.

Proporsi kemiskinan tinggi yang terjadi di Afghanistan menyebabkan kondisi anak-anak harus merasakan ketidaksetaraan kualitas hidup dibandingkan anak-anak di belahan dunia lain yang masih mendapat kehidupan yang layak sehingga peningkatan drastis level kemiskinan akibat invasi makin memperparah

keadaan kualitas kehidupan masyarakat di Afghanistan (Trani et al., 2013). Invasi dari AS juga berdampak pada sektor agrikultur yang menjadi tumpuan Afghanistan sejak dulu dalam meningkatkan roda perekonomian sehingga konflik dan peperangan menyebabkan kerusakan pada sumber daya alam yang terletak di area-area irigasi yang biasa menjadi tempat distribusi ekonomi bagi keberlangsungan hidup dan mata pencaharian warga lokal (Pain, 2016). Program bantuan internasional yang datang dibawah koordinasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) juga kesulitan dalam mendistribusikan bantuan secara merata karena lemahnya informasi dari badan resmi di Afghanistan dalam mengumpulkan informasi akurat tentang data kemiskinan masyarakat Afghanistan sehingga ini menyebabkan sekitar 65% keluarga di Afghanistan sangat rentan terdampak bencana alam jika terjadi karena sangat buruknya mitigasi bencana dari pemerintah lokal (Odilovich & Najibullah, 2021).

Dalam aspek bantuan kemanusiaan, di masa Presiden Bush, USAID (*United States Agency for International Development*) memulai rencana jangka panjang untuk mendistribusikan bantuan dimulai dari \$320 Juta alokasi anggaran yang dikoordinasi oleh USAID, OFDA (*Office of Foreign Disaster Assistance*), FFP (*Food for Peace*), USDA (*U.S. Department of Agriculture*), OTI (*Office of Transition Initiatives*), CDC (*Centers for Disease Control and Prevention*), HDP (*Humanitarian Demining Programs*), dan INL (*International Narcotics and Law Enforcement Affairs*) (Oliker et al., 2004). Program bantuan dari USAID bertujuan untuk antara lain: mengurangi angka kematian di Afghanistan, meminimalisir pergerakan populasi dari pengungsi, menurunkan dan menstabilkan harga makanan

di pasar sehingga bisa lebih mudah dijangkau oleh warga Afghanistan, menjamin bantuan dapat sampai ke populasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan untuk memulai mengembangkan proyek darurat penanganan bencana sebagai bagian dari proyek rekonstruksi jangka panjang Amerika Serikat untuk Afghanistan (Oliker et al., 2004, p.57).

Pada perkembangannya, anggaran bantuan kemanusiaan di Afghanistan mengalami kenaikan drastis di tahun 2002 berjumlah \$531,4 juta yang mayoritas anggarannya digunakan untuk penanganan bencana dan suplai makanan layak ke warga Afghanistan baik selama invasi dan perang berlangsung atau kondisi setelahnya (Oliker et al., 2004, p.58). Kebutuhan masyarakat Afghanistan juga menyangkut aspek bantuan yang menysasar pada kebutuhan pendidikan untuk sekolah bagi warga Afghanistan dan kebutuhan kehidupan untuk komunitas lokal yang ada di Afghanistan sehingga hal ini membuat NGOs (*Non Governmental Organizations*), Organisasi Internasional, CHLC (*Coalition Humanitarian Liaison Centres*) dan CJCMOTF (*Coalition Joint Civil-Military Operations Task Force*) melakukan integrasi operasi untuk memudahkan bantuan dan pendampingan dalam perkembangan infrastruktur rakyat, akses kesehatan, dan bantuan koordinasi migrasi untuk warga Afghanistan (Oliker et al., 2004, p.71).

Presiden Bush di era pemerintahannya menjadikan bantuan luar negeri sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri dengan memposisikan bantuan internasional sebagai alat diplomasi untuk mempromosikan pembangunan global di seluruh dunia dan mengupayakan dukungan kongres terhadap pengimplementasian kebijakan bantuan luar negeri AS yang salah satunya ditujukan untuk Afghanistan

(Lancaster, 2008). Hal ini sesuai dengan pidato Presiden Bush di *State Union* ketika menyinggung permasalahan Afghanistan dan proses rekonstruksi setelahnya:

“Afghanistan's people have been brutalized -- many are starving and many have fled. Women are not allowed to attend school. You can be jailed for owning a television. Religion can be practiced only as their leaders dictate. A man can be jailed in Afghanistan if his beard is not long enough. The United States respects the people of Afghanistan -- after all, we are currently its largest source of humanitarian aid -- but we condemn the Taliban regime.” (The White House, 2023).

Sikap Amerika Serikat di era Presiden Bush dalam menjadikan bantuan luar negeri ke Afghanistan sebagai prioritas hadir karena konsekuensi Afghanistan yang sudah dikategorikan sebagai *failed and fragile states* sehingga Afghanistan patut menjadi salah satu target penerima bantuan luar negeri terbanyak karena konflik seperti ancaman terorisme, perdagangan narkoba, diskriminasi terhadap perempuan, dan bentuk kriminal lainnya menciptakan krisis kemanusiaan besar (Lancaster, 2008, p.58). Pemerintahan Bush mendasari kebijakan bantuan kemanusiaan di Afghanistan berdasarkan beberapa faktor penting, antara lain: pemberontakan dari kelompok yang kontra dengan pemerintahan sehingga memunculkan darurat militer di beberapa wilayah, Afghanistan yang menjadi tempat berlindung/*shelters* dari warga Pakistan yang mengungsi akibat konflik atau bencana, kasus korupsi dan ketidakmampuan pemerintah Afghanistan dalam menghadirkan kebijakan yang adil bagi warganya, perdagangan narkoba, dan kasus perdagangan manusia (Stauss, 2012).

Dengan begitu, proses rekonstruksi di era Presiden Bush lewat alur bantuan kemanusiaan ditujukan untuk memfasilitasi transisi dari keadaan gejolak konflik internal yang terjadi di Afghanistan untuk mencapai kemandirian dalam mewujudkan perdamaian (Keane, 2016). Presiden Bush mendeskripsikan usaha membangun Afghanistan merupakan inisiatif Amerika Serikat dalam mentransformasi demokrasi dan meningkatkan situasi keamanan di negara tersebut (Keane, 2016, p.75). Tujuan dan kepentingan dari bantuan kemanusiaan di era Presiden Bush selaras dengan operasi militer selama invasi yang menempatkan pusat-pusat militer Amerika Serikat dan sekutu di beberapa daerah dan provinsi seperti: Kabul, Kandahar, dan negara tetangga Afghanistan di Timur Tengah dan Teluk Persia (Boulos & Zamorski, 2013). Melihat ancaman bersumber dari kelompok Taliban, Pemerintahan Bush menyelaraskan alokasi bantuan kemanusiaan sejalan dengan operasi militer agar dapat mencegah faktor resiko yang terasosiasi dengan kelompok Taliban di Afghanistan (Boulos & Zamorski, 2013, p.6). Hal ini menjadi penting karena permasalahan krisis kemanusiaan di Afghanistan terjadi akibat invasi dan perang melawan Taliban sehingga bantuan kemanusiaan di era Presiden Bush juga dibutuhkan untuk meningkatkan citra Amerika Serikat sebagai negara donor (Balarezo, 2011).

2.1.2 Invasi dan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Ke Afghanistan Era Presiden Barack Obama

Presiden Barack Obama adalah Presiden Ke-44 Amerika Serikat yang hasil Pemilihan Presiden nya di tahun 2008 menjadi sejarah bagi masyarakat Amerika Serikat karena Obama merupakan Presiden kulit hitam dan Presiden berasal dari ras

Afrika-Amerika pertama yang berhasil memimpin Amerika Serikat sebagai Presiden (Bligh & Kohles, 2009). Kehadiran Barack Obama seolah memberikan kesegaran baru dalam peta perpolitikan Amerika Serikat karena visi dan kampanye yang dibawa Obama berlandaskan pada keterkaitannya dengan perjuangan historis masyarakat kulit hitam bertepatan dengan 40 tahun kematian dari tokoh kulit hitam bersejarah Amerika Serikat, Martin Luther King, Jr ketika Obama terpilih (Darsey, 2009).

Sementara itu, Obama dalam hal kebijakan luar negeri khususnya pada kebijakan menyangkut Afghanistan dan Taliban, telah menjanjikan sejak kampanyenya bahwa strategi yang akan diadopsi di Pemerintahan Obama akan melibatkan strategi diplomasi untuk mengisolasi Taliban dan melanjutkan keberlanjutan program bantuan kemanusiaan termasuk di area perang yang dikuasai kelompok Taliban (Obama, 2013). Ini sesuai dengan rencana Obama untuk melancarkan perang terhadap Al Qaeda dan kelompok teroris lainnya sembari melanjutkan program kemanusiaan untuk masyarakat Afghanistan.

Ketika masa kampanye, publik Amerika Serikat memfokuskan perhatian pada isu krisis ekonomi dunia yang menjadi masalah utama Amerika Serikat sehingga terdapat tekanan publik ke Pemerintahan Bush pada saat itu untuk membatalkan invasi di Iraq dan negara Timur Tengah lainnya seperti Afghanistan karena anggaran perang yang dihabiskan terlampaui tinggi (JACOBSON, 2010). Pada tahun 2009 ketika Obama pertama kali menjadi Presiden, ia merespons tekanan ini dengan memerintahkan penerapan strategi dialog untuk mempromosikan *concern* terhadap pembangunan berkelanjutan di Afghanistan

dengan tetap mempertahankan tujuan Amerika Serikat untuk memukul mundur Taliban dari posisi kuat di daerah strategis seperti Kandahar, Selatan Helmand, dan Nangahar di Timur sehingga akan memaksimalkan narasi bahwa Taliban tidak akan bisa memenangkan perang melawan Amerika Serikat (Rasouli, 2020).

Gestur politik Obama untuk serius dalam memerangi Taliban dapat terlihat dari rencana kebijakan luar negerinya untuk memberikan objektif bahwa Amerika Serikat harus menghentikan perang berkepanjangan dengan Taliban karena hal ini termasuk salah satu kepentingan AS untuk fokus memerangi Al-Qaeda dan menangkap pimpinan utamanya, Osama Bin Laden (Mccrisken, 2012). Sementara terkait isu bantuan kemanusiaan di Afghanistan, Obama juga telah menetapkan rencana jangka panjang sebagai kelanjutan dari mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang sudah ada di pemerintahan sebelumnya sejak awal memimpin (Gibler & Miller, 2012).

Presiden Obama juga mencerminkan visi bantuan luar negeri AS yang beragendakan pada perluasan volume jumlah bantuan luar negeri untuk mendukung hegemoni Amerika Serikat khususnya di Timur Tengah (Gibler & Miller, 2012, p.1206). Hal ini pun diterapkan Obama pada implementasi kebijakan bantuan luar negeri yang memfokuskan pada isu kemanusiaan untuk menciptakan institusi pemerintahan negara penerima bantuan agar transparan dan dapat meminimalisir permasalahan korupsi di dalam alokasi bantuan luar negeri yang datang.

Ketika menjabat, Presiden Obama mengusahakan penguatan diplomasi internasional salah satunya terhadap kebijakan bantuan luar negeri dan invasi di

Afghanistan. Hal ini terlihat dari sikap Amerika Serikat di jamannya yang mengindikasikan bahwa Taliban dan Afghanistan memang tidak berkontribusi besar atau menjadi pionir utama dalam penyerangan 9/11 namun ini tidak membuat kebijakan militer terhadap Afghanistan harus dihentikan karena Presiden Obama bersamaan dengan invasi juga masih melanjutkan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan di Afghanistan (Henderson, 2010). Pada akhirnya, AS meneruskan upaya untuk membangun independensi dan meningkatkan level indikator kemanusiaan di Afghanistan bersamaan dengan kebijakan Presiden Obama untuk melanjutkan strategi perang terhadap Al-Qaeda dan sekutu sebagai alasan untuk menggunakan kekuatan senjata di Afghanistan (Henderson, 2010, p.433).

Di sisi Pemerintahan Afghanistan dibawah Presiden Hamid Karzai, Karzai menyambut baik terpilihnya Obama sebagai Presiden ditandai dengan narasi Hamid Karzai bahwa terpilihnya Obama dan indikasi kebijakan yang dijanjikannya di Afghanistan merupakan dimulainya era baru yang menjanjikan pemahaman mendalam terhadap situasi di Afghanistan (A. Khan, 2009). Tetapi di awal Obama memerintah, seiring proses bantuan kemanusiaan yang sudah masuk ke Afghanistan sejak jaman Presiden Bush, terjadi ketidakpuasan yang tinggi terhadap kepemimpinan Hamid Karzai yang dirasa gagal dalam mengakomodasi keamanan dan *good governance* sehingga menciptakan kritik internasional terhadap kebijakan Karzai mengenai kemanusiaan dan gagalnya Afghanistan dalam mewartakan masyarakat Afghanistan terkait kebutuhan dasarnya (Khan, 2009, p.2). Dalam

merespons ini, Presiden Obama mengenakan beberapa alternatif kebijakan bantuan luar negeri yang menasar untuk beberapa tujuan positif antara lain:

1. Menciptakan Pemerintahan Afghanistan yang kuat dan efektif.
2. Menghilangkan korupsi di Afghanistan khususnya pada anggaran bantuan luar negeri yang hadir.
3. Menekan angka perdagangan opium dan narkoba secara ilegal.
4. Bekerjasama dengan Pakistan terhadap operasi militer yang berlangsung untuk menghilangkan pengaruh Taliban secara bertahap.

Di jaman Presiden Obama, bantuan ekonomi juga diperkuat dengan fokus Pemerintah Obama untuk menjalankan proses rekonstruksi, pembangunan, dan peningkatan indikator kehidupan masyarakat Afghanistan ditandai dengan penambahan dana sebanyak \$1 Miliar untuk anggaran non-militer yang ditujukan untuk meningkatkan dukungan terhadap pendidikan, infrastruktur jalan, dan jasa kemanusiaan terkait lainnya (Khan, 2009, pp.2). Angka ini terbilang banyak untuk kebutuhan masyarakat Afghanistan yang di jaman Presiden Hamid Karzai masih menderita kemiskinan parah. Inisiatif yang dilakukan Obama ini sejalan dengan gestur politik internasional Obama yang ingin meningkatkan hubungan dengan negara-negara muslim sehingga hal ini mendapat respons positif awalnya dari Juru Bicara Taliban pada saat itu “Yousuf Ahmadi” (Khan, 2009, p.3).

Kebijakan bantuan luar negeri di Afghanistan oleh Presiden Obama merupakan tujuan Amerika Serikat sejak awal untuk merubah Afghanistan menjadi negara yang lebih terkoordinasi secara demokratis walaupun pada saat itu Barack

Obama belum menerapkan penarikan keseluruhan militer Amerika Serikat di Afghanistan utamanya karena masalah keamanan warga Afghanistan yang menyangkut dengan eksistensi Taliban yang masih kuat (Khan, 2009, p.5). Retorika Obama di Afghanistan yang kuat konsisten dengan rencana Amerika Serikat sejak awal pemerintahannya untuk berada di Afghanistan dalam jangka waktu yang lama sehingga proses rekonstruksi yang diterapkan Amerika Serikat ditandai dengan dukungan utama terhadap program nasional yang beroperasi secara independen dan mandiri dan menggunakan intrik koordinasi yang minim dengan Pemerintah Afghanistan yang dirasa Obama masih belum memiliki integritas memadai dalam mewadahi keadilan pembangunan di Afghanistan (Tellis, 2009).

Objektif ini ditujukan Presiden Obama untuk melindungi warga Afghanistan dengan menerima resiko bahwa kekuatan Taliban masih memengaruhi secara kuat sehingga alternatif persenjataan dan kekuatan militer yang diinisiasi Obama adalah menggunakan sumber daya seminim mungkin untuk kemaslahatan dan keamanan masyarakat Afghanistan (Tellis, 2009, p.46). Bantuan luar negeri yang hadir di jaman Presiden Obama pun hadir dengan syarat bahwa Pemerintah Afghanistan dibawah Presiden Hamid Karzai harus bertanggungjawab dengan mewadahi pasukan militer Amerika Serikat yang beroperasi di Afghanistan dengan kekuatan maksimal untuk mendukung upaya stabilisasi regional di daerah-daerah Afghanistan yang masih rawan dengan ancaman Taliban (Tellis, 2009, p.57). Manfaat bantuan luar negeri ke Afghanistan menjadi penting karena Afghanistan masih dilanda permasalahan utama terkait korupsi dan ketidakhadiran hukum yang dapat mengadili kombatan Taliban (Swenson, 2016). Tentunya ini selaras dengan

tujuan utama Obama untuk mempromosikan tatanan hukum yang efektif dan demi mengisi kekosongan keadilan hukum bagi warga Afghanistan sehingga nantinya akan menumbuhkan implikasi pembangunan bangsa di Afghanistan baik dari sisi domestik maupun internasional (Swenson, 2016, pp.114).

Proses pembangunan ulang khususnya pada sisi kemanusiaan yang diinisiatori oleh Obama mendapat respons dan atensi positif dari aktor-aktor internasional yang selama ini menyumbang lebih dari 90% pendanaan pembangunan di Afghanistan khususnya berasal dari negara-negara donor barat serta institusi dan badan internasional seperti *United Nations Development Programme* (UNDP) (Swenson, 2016, p.115).

Ada 5 objektif utama Presiden Obama dalam menerapkan bantuan luar negeri ke Afghanistan antara lain:

1. *Domestic Change*

Penguatan legitimasi Afghanistan yang telah dipenuhi oleh korupsi masif akibat gagalnya Pemerintah Hamid Karzai dalam mencegah perlakuan koruptif di birokrasi Afghanistan sehingga dengan salah satu objektif utama Amerika Serikat untuk menumpas Taliban di Afghanistan, Presiden Obama mengharapkan perubahan dasar secara masif dimulai dari level domestik menggunakan operasi militer dan bantuan luar negeri yang datang (Tellis, 2009, p.71).

2. *Law and order*

Tujuan utama terkait relevansi bantuan luar negeri dan hukum yang berlaku di Afghanistan adalah terkait penangkapan penjahat lokal dengan menguatkan

institusi badan kepolisian di Afghanistan yang sejak lama terancam oleh eksistensi Taliban sehingga Pemerintah Obama sejalan dengan bantuan luar negeri yang diberikan juga menerapkan *clearing operations* untuk penguatan badan-badan hukum baik di tingkat nasional maupun tingkat distrik sehingga dapat menghadirkan keadilan di sistem hukum negara Afghanistan yang masih bobrok selama Presiden Hamid Karzai memimpin (Tellis, 2009, p.72).

3. *Local reconstruction*

Usaha rekonstruksi lokal di Afghanistan diperlukan untuk mendukung percepatan kebutuhan ekonomi bagi Afghanistan sehingga Presiden Obama menggunakan perluasan program pembangunan bekerjasama dengan *Afghan Government's National Solidarity Program* untuk mendanai projek lokal untuk ribuan desa di Afghanistan agar dapat menggenjot roda perekonomian bagi warga Afghanistan sehingga konteks kebijakan yang diinisiasi di jaman Pemerintah Obama dapat berimplikasi signifikan bagi pembangunan ekonomi dengan mengedepankan distribusi kebutuhan ekonomi ke masyarakat sipil dan melatih warga lokal Afghanistan untuk memiliki skill ekonomi yang dapat digunakan kedepannya dengan menggunakan *Commander's Emergency Relief Program (CerP) Funds* terkait pendanaanya (Tellis, 2009, p.73).

4. *Successful elections*

Mendukung terciptanya pemilihan umum yang sukses menjadi salah satu kepentingan Amerika Serikat karena prospek terpilihnya kembali Hamid Karzai sebagai Presiden berpeluang besar terjadi kendati terdapat fakta kegagalan rezim

Karzai dalam memberikan keamanan dan pembangunan bagi masyarakat Afghanistan sehingga narasi kuat bahwa Karzai berpeluang menang menurunkan tingkat kepercayaan publik di dalam demokrasi dan kapabilitasnya dalam menciptakan perubahan yang sistematis sehingga sangat penting bagi Washington dan Obama untuk mendukung terciptanya pemilihan yang adil, transparan, serta kredibel dengan mendukung sebanyak mungkin kandidat untuk menciptakan diversitas opsi bagi warga Afghanistan yang tidak puas dengan kebijakan Presiden Hamid Karzai sehingga warga Afghanistan memiliki opsi untuk memilih alternatif kandidat lainnya (Tellis, 2009, p.80).

5. *External Change*

Di dalam perkembangan jumlah militan Taliban yang meluas sampai perbatasan Afghanistan-Pakistan membuat Amerika Serikat menaruh perhatian serius terhadap ini karena ancaman dari Taliban juga beroperasi dari luar khususnya dari Pakistan yang secara teritori menjadi cukup penting bagi pusat komando militer Taliban sehingga bagi Presiden Obama, menghilangkan ancaman dari luar menjadi penting untuk memaksimalkan alur bantuan luar negeri agar dapat teralokasikan baik ke warga Afghanistan dengan bekerjasama dengan Pakistan (Tellis, 2009, p.86).

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke Afghanistan di jaman Obama adalah refleksi dari kepentingan Obama dalam mempertahankan kedigdayaan dan hegemoni AS di Timur Tengah. Karena dengan menyerang Taliban dan Al Qaeda di Afghanistan relevan dengan fokus AS untuk memerangi *Global War on Terror*

(Husna, 2012). Lewat kebijakan ini, AS menjadikan kesejahteraan warga Afghanistan sebagai tanggung jawab Pemerintah Obama agar citra AS dapat diimplikasikan bertanggung jawab terhadap isu kemanusiaan walaupun invasi masih berlangsung.

Perang melawan Afghanistan dipersepsikan publik sebagai "*Obama's War*" karena atensi AS dalam perang telah memakan banyak sumber daya dari sisi Amerika Serikat dan memakan korban jiwa sipil di Afghanistan sehingga melanjutkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan menjadi sangat penting (Marsh, 2013). Obama sebagai pemimpin paham bahwa objektif kesuksesan dalam mempromosikan pembangunan kemanusiaan di Afghanistan adalah kunci kebijakan luar negeri Amerika Serikat agar proses transisi invasi untuk segera berakhir dapat dipercepat secara efektif (Marsh, 2013, p.5). Hal ini juga didukung oleh Pemerintahan Obama lewat Menteri Pertahanan Robert Gates dan suksesor setelahnya Ash Carter bahwa dalam alokasi bantuan luar negeri yang diberikan diiringi juga dengan peningkatan distribusi operasi militer agar Amerika Serikat dapat mencegah pengaruh Taliban agar tidak dapat menggulingkan rezim Hamid Karzai yang sedang berkuasa (Marsh, 2013, p.9).

Presiden Obama melalui kebijakan luar negerinya juga melakukan kompromi politik dari segi domestik untuk mempertahankan hegemoni Amerika Serikat. Hal ini didukung dari berbagai kebijakan luar negeri AS di jamannya lewat Menteri Luar Negeri, Hillary Clinton yang sangat aktif dalam mengadvokasikan isu terorisme di Timur Tengah (Marsh, 2013, p.21). Inisiatif Amerika Serikat ini digunakan sebagai upaya AS untuk mempertahankan kontrol Pemerintahan

Afghanistan non-Taliban di Kabul sehingga dapat melanjutkan upaya untuk menjaga stabilitas daerah-daerah konflik di Afghanistan seperti di Provinsi Helmand yang masih memiliki kasus dan konflik tinggi menyebabkan korban jiwa yang banyak (Cordesman, 2016). Hal ini menjadi penting karena sejak 2001 Amerika Serikat berkonflik dengan Al Qaeda, Taliban, dan sekutu sehingga mengharuskan Amerika Serikat untuk mempertahankan otoritas penggunaan militer agar bantuan luar negeri dapat efektif dilakukan untuk membantu advokasi kemanusiaan di Afghanistan (Cordesman, 2016, p.12). Gencarnya Pemerintah Obama dalam melakukan pendanaan bantuan kemanusiaan di Afghanistan juga demi memenuhi dua kepentingan utama, yang pertama adalah membangun keberlanjutan pembangunan kemanusiaan yang efektif dan kedua untuk memenuhi kritik dari Kongres Partai Republik terkait pemborosan dana luar negeri yang dilakukan Pemerintahan era Obama dalam mengalokasikan anggaran luar negeri Amerika Serikat (Cordesman, 2016, p.16).

2.1.3 Invasi dan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Ke Afghanistan Era Presiden Donald Trump

Presiden Donald Trump adalah Presiden Amerika Serikat ke-45 yang berhasil mengalahkan mantan Menteri Luar Negeri AS dari Partai Demokrat, Hillary Clinton di Pemilihan Presiden AS di 2016. Premis kampanye yang digunakan Trump dan timnya adalah konstruksi *authoritarianism* dimana prejudis dan narasi politik Trump ini berhasil membuat dirinya terpilih sebagai Presiden Ke-45 Amerika Serikat karena di kampanye Pilpres 2016 keterkaitan pemilih dengan

pemimpin berkarakter dominan dan mengedepankan kepentingan nasional utuh cenderung disukai pemilih dengan pendidikan rendah (Smith & Hanley, 2018).

Retorika Trump terkait kebijakan luar negeri mengadopsi *value isolationism, illiberalism, dan protectionism* terhadap kepentingan ekonomi Amerika Serikat dimana mekanisme ini diadopsi Pemerintahan Trump untuk menarik dukungan basis domestik sejalan dengan karakter kepemimpinan Trump yang ingin mengedepankan populisme dan memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan sebuah solusi kebijakan (Lacatus & Meibauer, 2021). Implementasi kebijakan luar negeri yang dijalankan Trump dapat terlihat dari arah kebijakan luar negeri AS yang mengedepankan diversitas opsi dengan mementingkan pencapaian surplus ekonomi domestik sebagai fokus utama dan menerapkan kebijakan antithesis terhadap berbagai bentuk intervensi kemanusiaan (Robertua, 2016).

Dengan begitu, Trump dalam melaksanakan kebijakan luar negeri di Afghanistan banyak dipengaruhi oleh karakter kepemimpinannya dan *value* yang ia percayai dalam mengambil keputusan terkait di Afghanistan (Sisman & Uslu, 2019). Untuk kebijakan luar negeri di Afghanistan, Presiden Trump memfokuskan stabilisasi konflik dan mencegah AS untuk tidak tergesa-gesa sehingga rencana untuk menarik keseluruhan militer dan menghentikan invasi tidak dilakukan secara kacau dengan mempertimbangkan deliberasi politik yang efektif untuk menghindari akhir yang berbahaya khususnya bagi kesejahteraan warga Afghanistan (Mirza & Malik, 2019). Fokus ini menjadi penting karena AS tidak boleh mengulang kegagalan di Vietnam sehingga mengambil keputusan luar negeri harus dilakukan berdasarkan konsiderasi yang berhati-hati khususnya pada jaman

Donald Trump. Apalagi melihat kondisi Afghanistan di jaman Trump yang memprihatinkan dengan melihat statistik bahwa Afghanistan adalah negara terkorup nomor 172 dari 175 negara di dunia (Transparency International, 2018). Hal ini membuat diskusi politik yang dilakukan Washington di jaman Trump masih mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan Amerika Serikat terlebih dahulu karena selain rencana Trump yang mengindikasikan keluar total dari Afghanistan, masih terdapat ketidakpercayaan Amerika Serikat terhadap alokasi bantuan luar negeri ke Afghanistan akibat pengaruh teroris yang kuat kendati komitmen dan hubungan antara Amerika Serikat dan Taliban demi mengupayakan rekonsiliasi tetap berjalan di jaman Trump (Mirza & Malik, 2019, p.363).

Sementara itu, tepat pada tanggal 29 Februari 2020 Presiden Trump dan Taliban resmi menandatangani perjanjian perdamaian di Doha, Qatar sebagai bentuk komitmen Amerika Serikat untuk menarik keseluruhan pasukan militer di Afghanistan dan memberikan independensi bagi warga Afghanistan untuk menentukan arah kebijakan negaranya sendiri (Verma, 2021). Tentunya perjanjian ini menimbulkan pro dan kontra karena dilihat dari persepsi publik internasional, langkah Presiden Trump dinilai kurang tepat karena membiarkan Taliban lebih leluasa di Afghanistan sehingga memungkinkan Afghanistan akan menjadi ladang perang yang lebih besar lagi utamanya memungkinkan negara tetangga Afghanistan seperti Iran, India, dan Pakistan mungkin akan mengambil keuntungan dari hal tersebut (Verma, 2021, p.2). Padahal tujuan awal dari negosiasi dialog di era Presiden Trump adalah demi menjamin Afghanistan agar tidak lagi menjadi tempat sarang terorisme seperti Taliban maupun Al Qaeda, tetapi intrik tujuan yang

berusaha mencapai target politik jangka pendek ini belum maksimal karena buruknya sistem birokrasi dan sektor pelayanan publik lainnya yang masih memiliki indikator lingkungan yang koruptif membuat Afghanistan masih rentan akan ancaman di perdesaan maupun di pusat kota seperti Kabul (NASRAT, 2020).

Karena permasalahan seperti lemahnya sistem pemerintahan dan hukum, intervensi berlebihan dari aktor asing serta distribusi kekuasaan yang tidak seimbang membuat Afghanistan masih memiliki isu terkait absennya strategi politik yang tepat guna memaksimalkan proses negosiasi yang berjalan sehingga hal yang dimaksud seperti alokasi bantuan luar negeri yang tujuannya untuk meningkatkan dan menyamaratakan ketimpangan bagi warga Afghanistan harusnya dapat dilakukan sejak era Pemerintahan Trump (NASRAT, 2020, p.25). Pasalnya, ketidakonsistenan Pemerintahan Trump dalam merespons isu kemanusiaan di Afghanistan terjadi karena anggapan Amerika Serikat sejak jamanjaya bahwa keberadaan AS di Afghanistan justru merugikan bagi kepentingan Amerika Serikat sehingga peralihan fokus kebijakan luar negeri AS beralih ke Pakistan yang menurut Trump berpotensi besar menjadi tempat penampungan terorisme sehingga mengancam kedaulatan yang ada di Afghanistan (Purba et al., 2022).

2.2 Dinamika Kepemimpinan Afghanistan Di Era Invasi Amerika Serikat

2.2.1 Dinamika Kepemimpinan Presiden Hamid Karzai

Presiden Hamid Karzai adalah Presiden Afghanistan yang dilantik setelah kejatuhan Taliban akibat dimulainya Invasi AS di tahun 2001. Presiden Karzai

dilantik pada 7 Desember 2004 di Kabul, Afghanistan. Persepsi publik Afghanistan terhadap Hamid Karzai merupakan pemimpin yang bersih dan dapat diterima secara general bagi masyarakat Afghanistan karena menjanjikan pemerintahan yang bersih, tidak korup dan menghindari pertumpahan darah sebagai pengambilan suatu aksi atau keputusan terkait kesejahteraan warga Afghanistan (Rashid, 2006).

Presiden Karzai yang berasal dari suku Pashtun mendapat dukungan dari kedua komunitas baik dari suku Pashtun dan suku Non-Pashtun sehingga Karzai direfleksikan sebagai pemimpin yang dapat membawa proyek rekonstruksi nasional untuk menyatukan polarisasi antara kedua kubu yang terjadi sejak Taliban mengambil alih Afghanistan dari invasi Uni Soviet (Rashid, 2006, p.33). Demi melenggangkan rencana ini, Presiden Hamid Karzai meminta bantuan dari sekutu terutama pada Presiden Bush untuk menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap tujuannya sebagai pemimpin utama poros komunitas internasional yang menjanjikan kebijakan pembangunan rekonstruksi bangsa bagi Afghanistan baik dari Kabul sampai daerah Kandahar sehingga alternatif kebijakan internasional terkait perjanjian ini dilakukan Presiden Karzai untuk meningkatkan *engagement and partnership* dengan Amerika Serikat dan Britania Raya (Rashid, 2006, p.33).

Sementara terkait kebijakan Presiden Karzai terhadap Operasi Penangkapan Osama Bin Laden oleh Amerika Serikat, Presiden Karzai juga mengimbau dan mengajak partisipasi masyarakat Afghanistan untuk turut serta membantu Amerika Serikat dalam mencari keberadaan Al Qaeda dan teroris terkait yang terindikasi bersembunyi di wilayah Afghanistan Selatan (Hardiyanti, 2018). Selain itu, Presiden Karzai juga aktif menginisiasikan penumpasan panglima perang Taliban

di wilayah Afghanistan dengan meminta dukungan militer dari Amerika Serikat dan sebagai keuntungan balik, Amerika Serikat misalnya pada era Presiden Barack Obama juga meminta sembilan wilayah utama Afghanistan, untuk dijadikan pangkalan dan markas militer Amerika Serikat antara lain: Kabul, Bagram, Jalalabad, Mazar-e-Sharif, Gardez Kandahar, Helmand, Herat, dan Shindand (Hardiyanti, 2018, p.23).

Salah satu fokus perhatian Karzai ketika menjabat adalah terkait permasalahan korban jiwa akibat perang melawan Taliban karena hal ini membuat tekanan politik yang menuntut agar Presiden Karzai bisa melakukan respons tanggap. Pada masa kepemimpinan Hamid Karzai, dinamika awal terkait perjanjian damai Amerika Serikat-Taliban dan rencana penarikan militer sudah dilakukan di tahun 2011. Tetapi tantangan muncul karena proposal dari Hamid Karzai adalah Karzai akan menjadi komando utama untuk memimpin perjanjian dan negosiasi damai dengan Taliban tetapi Amerika Serikat dibawah Presiden Obama memiliki kebingungan karena proposal Presiden Hamid Karzai juga menginginkan pertukaran tahanan penjara yang menyulitkan Amerika Serikat untuk menyetujui ini sehingga proses kebijakan penarikan militer dan perjanjian damai secara keseluruhan terlihat kompleks di era kepemimpinan Presiden Hamid Karzai (Neumann, 2015). Tantangan dari sisi domestik juga dialami Hamid Karzai ketika memimpin terutama terkait kasus korupsi dari bantuan luar negeri Amerika Serikat ke negaranya serta kasus keamanan yang masih menjadi momok menakutkan bagi warga Afghanistan yang implikasinya membuat Afghanistan masih berkutut dengan kemiskinan di masa pemerintahannya (Neumann, 2015, p.13).

2.2.2 Dinamika Kepemimpinan Presiden Ashraf Ghani

Presiden Mohammad Ashraf Ghani adalah Presiden yang terpilih pada September 2014 yang pada awal masa pemerintahannya mendapat tekanan dari publik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga janji kampanyenya untuk warga Afghanistan berpusar pada kebijakan untuk mengakomodasi pelayanan birokrasi yang baik dan adil, serta keadilan yang merata untuk warga Afghanistan (Hatta, 2017). Presiden Ashraf Ghani mengadopsi visi kebijakan yang istilahnya disebut “Persatuan Nasional”/”*National Unity*” yang tujuannya adalah memperkuat basis pemerintahan yang demokratis, transparan dan dapat menjamin keadilan dan perubahan sosial untuk Afghanistan sehingga dapat mengatasi permasalahan utama Afghanistan utamanya pada aspek sosial-ekonomi (Hatta, 2017, p.60).

Pada saat Ghani menjabat, permasalahan korupsi masih menjadi momok utama sektor birokrasi di Afghanistan. Karena pada jamannya ketika Presiden Ghani memimpin, Afghanistan adalah negara terkorup kedua di dunia (Hatta, 2017, p.61). Ashraf Ghani juga memiliki pandangan yang progresif terkait isu hak-hak perempuan demi mengentas diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini berimplikasi langsung terhadap kebijakan nasionalnya misal dengan menunjuk empat perempuan untuk mengisi spot kabinet dan menunjuk tiga duta besar perempuan dari Afghanistan (Hatta, 2017, p.73). Terkait negosiasi dengan Taliban, Presiden Ghani juga mencoba pendekatan yang kurang lebih sama dengan pendahulunya, Hamid Karzai yakni aktif melakukan negosiasi dengan kelompok Taliban agar tujuan berunding secara damai dapat dilakukan (Hatta, 2017, p.78). Akan tetapi

negosiasi agar membuat Taliban patuh dan memukul mundur pasukannya semakin menjadi kompleks dikarenakan Taliban tidak terlalu memperdulikan proposal damai Presiden Ghani karena merasa eksistensi Amerika Serikat di Afghanistan harus ditumpas terlebih dahulu agar dapat memuluskan tujuan Taliban untuk menegakan hukum Islam secara utuh (Hatta, 2017, pp.78).

Karena visi progresif Ashraf Ghani tersebut, masyarakat Afghanistan masih memiliki harapan kepercayaan terhadap kepemimpinannya walaupun perubahan reformasi terkait penumpasan korupsi hanya sedikit hasilnya dan kendati demikian, Ashraf Ghani kembali terpilih menjadi Presiden Afghanistan untuk periode kedua pada tahun 2019 dengan memenangkan Pemilu Presiden Afghanistan (Umam, 2021). Sementara itu, melewati dinamika politik yang terjadi, Presiden Ashraf Ghani juga menjadi Presiden Afghanistan pertama yang melarikan diri dari Kabul dikarenakan Taliban yang mengambil alih kekuasaan setelah Presiden Joe Biden memutuskan melanjutkan penarikan militer secara keseluruhan (Anton et al., 2023). Penarikan militer dan penghentian invasi AS ke Afghanistan juga terjadi di jaman Presiden Ashraf Ghani sehingga di bawah pemerintahannya Taliban sebagai kelompok untuk pertama kalinya sejak 2001 berhasil melancarkan operasi penguasaan Ibu Kota Afghanistan, Kabul secara menyeluruh sekaligus menggulingkan dan mengukudeta sistem pemerintahan Ashraf Ghani yang membuatnya harus melarikan diri dan bersembunyi keluar Afghanistan (Anton et al., 2023, p.176).

Kekacauan yang terjadi di akhir kepemimpinan Ashraf Ghani membuktikan bahwa penopang utama Pemerintahan Hamid Karzai dan Pemerintahan Ashraf

Ghani terletak pada operasi militer dari Amerika Serikat sehingga terjadinya absen kekuasaan (*vacuum of power*) melemahkan sistem pemerintahan kedua era Presiden (Presiden Hamid Karzai dan Presiden Ashraf Ghani) yang selama ini mendapat keuntungan dari sokongan militer Amerika Serikat (Anton et al., 2023, p.178).

2.3 Taliban Sebagai Faksi Berpengaruh di Afghanistan

Taliban muncul sebagai salah satu faksi Islam di Afghanistan yang berasal dari perkumpulan murid-murid madrasah yang mendasarkan ajaran utama pada teologi Islam dicampur dengan ajaran fundamentalis bentukan Pakistan dan Afghanistan yang di didik awalnya untuk menghindari pengaruh Uni Soviet dalam perang Uni Soviet-Afghanistan di tahun 1990-an sebelum Uni Soviet mundur di tahun 1992 dan kemudian kelompok ini merupakan salah satu dari berbagai faksi ‘mujahidin’ di Afghanistan yang berniat untuk menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul (Siagian & Pratiwi, 2008, p.164). Taliban sendiri berasal dari suku ‘*Pashtun*’ yang interpretasi ajarannya sangat berseberangan dengan konsep kemanusiaan sehingga menimbulkan aksi-aksi diskriminatif terhadap warga ‘*non-Pashtun*’ di Afghanistan ditandai dengan berbagai serangan Taliban ke gedung-gedung sekolah, gedung pemerintahan, dan rumah sakit yang tujuannya untuk menumbangkan rezim pemerintahan Afghanistan dan mengambil alih tampuk pemerintahan (Siagian & Pratiwi, 2008, p.165).

Berkuasanya Taliban di Afghanistan dimulai dari rentang tahun 1996 sampai 2001 ketika Taliban dapat memanfaatkan situasi mundurnya pasukan Uni Soviet dari Afghanistan (Azria & Ramayani, 2022, p.127). ‘Mullah Muhammad

Omar' beserta 15,000 murid yang tergabung dalam madrasah lalu mencentuskan kelompok Taliban dan mengajak berbagai dukungan dari kelompok pasukan muslim konservatif yang berada di Afghanistan dan luar negeri untuk melancarkan serangan ke Kabul dengan tujuan untuk menumbangkan kubu pemerintahan (Azria & Ramayani, 2022, p.128). Selain Kabul, Taliban juga berhasil menguasai lebih dari 90% teritori Afghanistan termasuk di Herat, Jalalabad, dan Kandahar (Nafisah, 2019). 'Mullah Muhammad Omar' kemudian diangkat menjadi pemimpin tertinggi atau yang disebut Taliban sebagai '*Amirul Mu'minin*' sebuah frasa yang mengartikan seseorang sebagai pemimpin pengganti Nabi dan Rasul di dalam ajaran agama Islam.

Selama membentuk pemerintahan di Afghanistan, 'Mullah Muhammad Omar' memberlakukan kebijakan yang berbeda dengan kebanyakan negara muslim lainnya lewat dekrit yang dikeluarkan Omar, banyak larangan dan pembatasan aktivitas bagi warga Afghanistan antara lain:

1. Mematikan seluruh suara oposisi baik itu organisasi maupun kelompok yang tidak setuju dengan keberadaan dan cara pandang memimpin dari Taliban.
2. Mewajibkan pria untuk menumbuhkan jenggot dan tidak segan dalam memenjarakan dan memukuli pria yang tidak memelihara jenggot mereka.
3. Melakukan penangkapan sepihak bagi warga Afghanistan yang tidak menunaikan shalat berjamaah.

4. Melarang aktivitas serta menutup akses pertelevisian, musik, film, internet, berdansa, menyanyi, dan kegiatan serupa yang menurut Taliban tidak sesuai dengan syariat Islam.
5. Larangan sekolah bagi kaum perempuan dan membatasi pekerjaan perempuan hanya sebagai pekerja rumah tangga.

Berbagai larangan yang membatasi kehidupan dan kesejahteraan warga Afghanistan merupakan bentuk kerepresifan Afghanistan dibawah pemerintah Taliban yang berkuasa sejak 1996-2001 sebelum akhirnya harus tumbang oleh kebijakan Invasi AS dalam operasi *War On Terror* untuk menangkap Osama Bin Laden yang bekerjasama dengan Taliban terkait anggaran dan operasi perang dari kedua organisasi tersebut.

Setelah Invasi AS, fokus Taliban sendiri berubah untuk menjaga kedaulatan Afghanistan dan memiliki misi untuk menumbangkan rezim Kabul yang dianggap Taliban sebagai “boneka” Amerika Serikat (Borthakur & Kotokey, 2020). Retorika Taliban menganggap bahwa rezim Afghanistan yang bekerjasama dengan AS baik di kepemimpinan Hamid Karzai ataupun Ashraf Ghani merupakan gambaran dari musuh Islam sebenarnya yang tidak mau mengaplikasikan sistem pemerintahan kekaisaran Islam sebagai fondasi dasar negara sehingga mereka yang pro terhadap barat dianggap sebagai musuh negara (Semple, 2015).

Sementara itu, keberadaan Taliban ketika masih berkuasa di Afghanistan menggunakan basis ajaran ‘*Jihadis*’ untuk disebarkan kepada pengikut dan warga Afghanistan. Bahkan sejak misi Taliban dalam penumpasan dan perang melawan

Uni Soviet, ajaran '*Jihadis*' sudah diajarkan sejak dini oleh guru-guru di Madrasah kepada muridnya (Afzal Upal & Cusack, 2021). Manifestasi ajaran '*Jihadis*' oleh Taliban lalu digabungkan ke dalam aspek pendidikan antara lain dengan menerapkan (Subh, H, 2022):

1. Penghapusan buku dan subyek pendidikan kurikulum yang tidak sesuai dengan persepsi dan ideologi yang dianut Taliban.
2. Menormalisasi kekerasan, kerusakan, kehancuran, dan peperangan sebagai hal yang lumrah di dalam kehidupan.
3. Mengedepankan propaganda Jihad dan melaksanakan advokasi larangan berdemokrasi dan membatasi aspek hak asasi manusia.
4. Menganggap perempuan sebagai kasta gender yang rendah.
5. Mengganti narasi sejarah dan memfokuskan ajaran kurikulum pada dunia Islam dan menolak dunia non-Islam.
6. Merendahkan harkat martabat organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai musuh utama negara.

Usaha Taliban dalam menanamkan doktrin tersebut merupakan langkah kelompok ini untuk mempromosikan ajaran Islam versi Taliban yang bertujuan untuk menciptakan warisan ke generasi pemuda Afghanistan untuk siap dalam bersenjata dan nantinya dapat digunakan sebagai sumber daya untuk peperangan melawan musuh (Afzal Upal & Cusack, 2021, p.376).

Perang sudah menjadi tumpuan utama Taliban dalam menggerakkan roda pemerintahan untuk meraup keuntungan karena Taliban sendiri secara konsisten

menerapkan '*Jihad Fisabililah*' dalam merubah suatu struktur kehidupan bermasyarakat yang dibarengi dengan aksi brutal dan represif khususnya kepada kaum perempuan sehingga Taliban yang merupakan salah satu faksi yang bergerak sebagai kelompok '*Islam Sunni*' ini kerap mendapat kritikan dari dunia internasional tentang sejarah dan perlakuan kelompok ini terhadap warga yang dipimpinnya (Fahriani, 2020). Oleh karena itu, sejak tahun 1990-an strategi Taliban dalam membatasi kebebasan dalam aspek akademik dan materi yang diajarkan di institusi pendidikan sudah menjadi tumpuan dalam memengaruhi cara pandang berpikir warga Afghanistan sejak dahulu (Ahmadi, 2022). Bahkan Taliban pada perkembangannya tidak segan dalam menyerang pusat-pusat sekolah yang tidak menerapkan pendidikan sesuai doktrin Taliban (Amiri & Jackson, 2021).

Kebijakan Taliban yang mencoba menjauhi warganya dari pengaruh Barat merupakan salah satu agenda Taliban yang tidak suka dengan ajaran sekularisme padahal jika dilihat negara Islam lainnya di berbagai belahan dunia, aspek modernisasi barat lewat sekularismenya masih dapat diterapkan secara demokratis tanpa harus menghilangkan ajaran agama Islam sebagai basis kehidupan utama warga suatu negara (Fanani & Andri, 2021). Sementara bagi negara-negara barat seperti Amerika Serikat, gerakan yang dimotori oleh Taliban dianggap sebagai ajaran terorisme yang menjadi suatu ancaman besar bagi ketertiban dunia. Taliban sebagai suatu kelompok Islamis melandaskan ajarannya pada '*Konservatisme*' yang menolak ajaran barat dan menolak prinsip '*Islam Syiah*' sehingga tafsiran Taliban tentang kehidupan berlandaskan pada aktivisme yang menolak seluruh model kehidupan budaya dan gaya barat serta mengaplikasikan Islam sebagai entitas

syariah identitas berkehidupan masyarakat Afghanistan (Fanani & Andri, 2021, p.104). Karena ideologi Taliban tersebut, Afghanistan yang menolak paham demokratisasi secara menyeluruh rentan terkena konflik dan peperangan menyebabkan Afghanistan sejak dekade 2000-an dikategorikan sebagai *failed state* dan menjadi negara dengan tingkat rawan konflik sangat tinggi serta keamanan yang buruk dikarenakan konflik yang terjadi secara rumit dan kompleks antara Taliban dengan musuh-musuhnya salah satunya Amerika Serikat (Fanani & Andri, 2021, p.108).

Gerakan Taliban yang semakin represif dan brutal sejak kelompok ini berkuasa di tahun 1996, membuat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bergerak cepat dengan mendukung upaya Amerika Serikat dalam proyek pembangunan bangsa (*Nation Building Project*) (Bazai et al., 2019). Strategi Taliban sendiri ketika Amerika Serikat melakukan invasi ke Afghanistan adalah menggunakan strategi yang sama dengan kelompok teroris lainnya yakni mencoba menggantikan kekuasaan pemerintahan yang sedang berkuasa dengan menargetkan operasi serangan ke badan-badan pemerintahan, institusi negara, kelompok/suku yang berseberangan dengan ideologi yang diyakini, dan mematikan pengaruh individu atau kelompok yang dianggap sebagai musuh (Bazai et al., 2019, p.345). Dukungan yang coba dikumpulkan Taliban tidak hanya berpusat pada kekuatan internal dari kelompok ini saja. Taliban juga mendapat dukungan dari faksi *Talibani Pakistani*, faksi ini juga beraliansi dengan kelompok Jihadis lain yang memiliki objektif dalam menumpas paham sekularisme dan kekuatan barat seperti Amerika Serikat (Bazai et al., 2019, p.349).

Seiring dengan perkembangan politik setelah penyerangan 9/11, Osama Bin Laden mencari tempat persembunyian untuk mempersiapkan operasi militer dalam membangun kekuatan Al-Qaeda secara diam-diam dimana Afghanistan menjadi salah satu tempat persembunyian Al-Qaeda (Qian, 2020). Dilihat dari relevansinya, Taliban dan Al-Qaeda secara prinsip memiliki tujuan yang sama demi menegakan pengaruh Islam di berbagai tempat lewat aksi-aksi jihadis.

Dalam meluaskan operasi militernya, Taliban adalah gerakan dengan tingkat kerahasiaan tinggi dengan tujuan dalam mempromosikan jihadis di Afghanistan dan menerapkan hukum islam secara ketat di area-area yang telah dikontrol oleh Taliban. Struktur komando perang Taliban bukan hanya dipimpin oleh seorang pemimpin atau komandan utama melainkan mengadopsi strategi tradisional Taliban yang terafiliasi dan membagi pimpinan ke beberapa pemimpin-pemimpin lokal yang terhubung dengan masing-masing jaringan Taliban sebagai utusan komando markas pusat (Christia & Semple, 2009, p.41). Strategi ini efektif di mata Taliban karena ini merupakan strategi militer yang dapat menghubungkan jaringan-jaringan komando lokal Taliban sehingga strategi ini membuat operasi militer yang dilakukan di Kabul oleh Pemerintah Afghanistan dan Amerika Serikat tidak selemah itu dalam menemukan jaringan komunikasi dari Taliban di beberapa wilayah terpencil dan jauh dari Kota Kabul (Christia & Semple, p.42). Hasilnya bagi Taliban, Afghanistan lantas kemudian menjadi medan perang antara pasukan gabungan Amerika Serikat dan Afghanistan melawan kelompok Taliban. Keberhasilan Taliban dalam meluaskan jaringan kelompoknya berimplikasi pada perluasan pasukan oleh Amerika Serikat yang mengeluarkan banyak dana militer

demi mengalahkan Taliban dan membuat perang AS-Taliban di Afghanistan menjadi perang terlama sepanjang sejarah militer Amerika Serikat (Cox, 2022).

Kekacauan selama ini membuat populasi Kabul yang tadinya menyentuh angka 2 Juta penduduk menjadi hanya 500,000 penduduk per tanggal 21 Agustus 2021 ketika Presiden Joe Biden memutuskan untuk menghentikan secara resmi invasi AS ke Afghanistan lewat kebijakan penarikan keseluruhan militer (Cox, 2022, p.2). Besarnya anggaran perang Amerika Serikat ke Afghanistan dari era Presiden George W. Bush, Presiden Barack Obama, dan Presiden Donald Trump sampai pada akhirnya Presiden Joe Biden, terjadi lantaran menumpas Taliban tidak hanya berarti melakukan operasi perang secara terbuka tetapi Amerika Serikat juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga Afghanistan dari kasus-kasus perdagangan manusia, perdagangan narkoba, penyusupan imigran, dan pendiskreditan hak bagi kaum perempuan dan anak-anak yang semua permasalahan ini diinisiasi oleh ideologi dan perbuatan Taliban selama eksis di Afghanistan baik sebelum, saat, dan sesudah invasi (Cox, 2022, p.9).

2.4 Kebijakan USAID (*United States Agency for International Development*) dan UNAMA (*United Nations Assistance Mission in Afghanistan*)

2.4.1 Kebijakan USAID (*United States Agency for International Development*) dan UNAMA (*United Nations Assistance Mission in Afghanistan*) Era Presiden George W. Bush

Akibat invasi AS ke Afghanistan sejak 2001 dan kebijakan *Global War On Terror* diterapkan oleh Presiden George W. Bush, terdapat kenaikan signifikan dalam jumlah bantuan luar negeri Amerika Serikat khususnya pada dua negara,

yakni Iraq dan Afghanistan (Moss et al., 2005). Keterkaitan antara *Global War On Terror* dan naiknya anggaran bantuan luar negeri Amerika Serikat dapat relevan dimaknai oleh Pemerintah AS sebagai alat untuk membangun rekonstruksi berkepanjangan di Afghanistan.

USAID (*United States Agency for International Development*) adalah organisasi primer Pemerintah Amerika Serikat sebagai badan yang aktif dalam penanganan masalah kemiskinan dan mempromosikan serta mengadvokasikan keseriusan dalam meningkatkan indikator perekonomian warga dunia yang masih di bawah rata-rata sehingga memunculkan fungsi utama USAID sebagai bantuan pembangunan termasuk mendukung kebijakan untuk *Child Survival and Health* (CSH), *Development Assistance* (DA), *The Economic Support Fund* (ESF), dan *Food Aid* (FA) (Moss et al., 2005, p.4). Implikasi anggaran bantuan luar negeri yang dikeluarkan AS ke seluruh dunia juga telah menyentuh lebih dari 100 Miliar Dollar AS yang mayoritas pendanaannya disalurkan lewat Kementerian Pertahanan (*Department of Defense*) dan USAID (*United States Agency for International Development*) dimana untuk bantuan ke Afghanistan, 70% dana bantuan luar negeri ke Afghanistan digunakan untuk mendukung penguatan militer Afghanistan dibawah Presiden Hamid Karzai yang berlanjut ke Presiden Ashraf Ghani utamanya untuk penguatan kekuatan kombatan militer anti teroris dan pelatihan polisi lokal untuk menjaga kestabilan di daerah-daerah Afghanistan (Lutz & Desai, 2014).

Sementara itu, untuk USAID yang menangani rekonstruksi di Afghanistan, anggaran juga digunakan untuk suplai energi, infrastruktur jalan dan transportasi bagi warga Afghanistan, *Counternarcotics*, *Afghan National Security Forces*,

penegakan hukum, peningkatan indikator kesejahteraan ekonomi dan kebebasan politik, serta mempermudah akses kesehatan dan pendidikan (Lutz & Desai, 2014, p.12).

USAID di Afghanistan menggunakan strategi dengan *timeline* yang memiliki objektif jangka panjang dengan periode tahunan memiliki masing-masing alokasi kebutuhan sebagai berikut (W. Hammink, 2017):

- a) 2002-2003: Mengentaskan krisis kemanusiaan, *Counterterrorism*, dan rekonstruksi.
- b) 2004-2005: Rekonstruksi servis dan provisi sosial.
- c) 2006-2008: Stabilisasi, *Counter Narcotics*, dan alokasi bantuan ke provinsi-provinsi.
- d) 2009-2011: *Counterinsurgency*.
- e) 2011-2014: *Capacity Building*, infrastruktur Energi, dan transisi pemerintahan.

Selama perang berlangsung, tidak hanya pasukan militan yang menjadi korban jiwa tetapi juga masyarakat sipil. Terhitung sejak 2001-2015 sebagai puncak konflik AS-Afghanistan dan berdasarkan data dari *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA), perang sejak era Bush menyebabkan 29,818 masyarakat sipil tewas di Afghanistan (Crawford, 2016, p.3). UNAMA sendiri didirikan berdasarkan Resolusi PBB 1401 pada tahun 2002 sebagai badan yang bergerak dalam misi kemanusiaan di Afghanistan dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Afghanistan serta untuk meminimalisir

dampak kerusakan yang terjadi akibat perang (Putri & Khairunnisa, 2023). Dibentuknya UNAMA merupakan mandat langsung dari Dewan Keamanan PBB (DK PBB) sebagai dukungan dari anggota negara PBB seperti Amerika Serikat dalam memfasilitasi investigasi dan peradilan bagi tahanan-tahanan di Afghanistan (Putri & Khairunnisa, 2023, p.12). Badan seperti UNAMA dibutuhkan Amerika Serikat dalam upaya rekonstruksi kerja sama internasional untuk membangun Afghanistan karena konflik di Afghanistan merupakan konflik berkepanjangan terkhusus pada kebebasan berekspresi bagi perempuan dan laki-laki yang dianggap Taliban kurang islami dalam berkehidupan (Mertus & Benjamin, 2000).

Hal tersebut berimplikasi pada program stabilisasi ke komunitas-komunitas pedalaman di Afghanistan setelah konflik dan perang menggunakan operasi bantuan luar negeri dengan pendekatan ke pemimpin-pemimpin lokal komunitas di Afghanistan sehingga hal ini disebut *Community-level quick response* menggunakan agensi-agens internal dari staff USAID di Kabul bekerjasama dengan Kementerian Keuangan mengadopsi *government-to-government programs* (Hammink, 2017). Selama perkembangannya, USAID bersama sama dengan *Afghanistan Provincial Reconstruction Team Program*, telah menempatkan staff-staff mereka di *Combined Joint Special Operations Task Force - Afghanistan* (CJSOTF-A) (Hammink, 2017, p.2). Dampak pendanaan dari USAID terlihat langsung dalam dukungan komunitas lokal yang mendapat keuntungan (Hammink, 2017, p.6).

Sementara itu, Amerika Serikat yang memulai invasi pada akhir tahun 2001 semakin memperparah kondisi kemiskinan Afghanistan yang sudah dilanda

kemiskinan akut, lemahnya pengawasan keamanan, dan sejarah buruk terkait pelanggaran hak asasi kemanusiaan membuat Afghanistan merupakan salah satu negara di dunia dengan *Human Development Indicators* terendah menurut *UNDP's Human Development Index* (Atmar, 2001). Urgensi lain yang melanda Afghanistan juga diperparah oleh kebijakan diskriminatif Taliban terhadap kesetaraan gender dan kerusakan akibat perang AS-Taliban sejak 2001 (Atmar, 2001, p.323). Selama Taliban berkuasa sampai tahun 2001, dana infrastruktur yang harusnya dialokasikan untuk pembangunan bangsa juga banyak disalahgunakan dengan munculnya kasus korupsi di dalam sistem birokrasi yang berlangsung (DCAF Afghanistan Working Group, 2011). Hal ini yang membuat Afghanistan banyak mengalami kendala terkait minimnya akses listrik, pengangguran yang tinggi, akses jalan rusak, air sanitasi yang kotor, dan rendahnya kualitas akses-akses fasilitas umum warga yang penting seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan sosial (Sadat & Satkowski, 2015).

Rangkaian permasalahan di Afghanistan membuat Pemerintahan George W. Bush memulai bantuan kemanusiaan berdasarkan urgensi kondisi Afghanistan yang semakin parah dan membutuhkan pertolongan. Hal ini juga yang membuat proses pembangunan di Afghanistan berdasarkan bantuan yang datang, menempatkan prioritas kebutuhan listrik, air, kesehatan, dan pendidikan untuk dapat didistribusikan selayak mungkin ke warga Afghanistan (Sadat & Satkowski, 2015, p.65). Bagi Pemerintahan Bush, invasi di Afghanistan harus diakhiri dengan kemenangan dalam medan perang dengan strategi militer yang diberlakukan

sehingga konsekuensi jika perang harus mengorbankan kerusakan di area-area dan bangunan masyarakat tidak dapat dihindarkan (Joseph, 2014).

Kebergantungan Afghanistan dengan bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat sendiri dapat memudahkan hadirnya atensi dan respons dunia untuk membantu Afghanistan di tengah krisis yang melanda karena segala bantuan yang hadir mengedepankan pembangunan kemanusiaan untuk masyarakat Afghanistan yang terdampak dengan melibatkan PBB, *Non Governmental Organizations (NGOs)*, dan filantropis (Mena & Hilhorst, 2020). Mengerucut pada antisipasi dari organisasi dunia seperti PBB dan negara donor terbesar seperti Amerika Serikat, bantuan yang datang juga dialokasikan untuk menciptakan kebijakan *Disaster Risk Reduction (DRR)* yang dapat membantu pendanaan bagi Pemerintah Afghanistan untuk menangani segala macam bentuk bencana (Mena & Hilhorst, 2020, p.10).

2.4.2 Kebijakan USAID (*United States Agency for International Development*) dan UNAMA (*United Nations Assistance Mission in Afghanistan*) Era Presiden Barack Obama

Di era Presiden Obama, ia mendapat tantangan kepentingan dari Afghanistan sebagai negara terkait kebijakan demokratisasi lewat USAID. Di satu sisi, Afghanistan masih menerima advokasi demokratisasi yang diinisiasi oleh USAID dan Amerika Serikat memiliki tujuan untuk memodernisasi Afghanistan menjadi lebih demokratis namun di lain sisi, Afghanistan masih memiliki keinginan agar pengambilan keputusan secara demokratis diserahkan penuh otoritasnya kepada kekuatan lokal dan daerah di Afghanistan sebagai pemangku kebijakan (Hill, 2010). Dilema ini bagi Pemerintah Afghanistan terjadi karena di *statusquo*

ketika Obama memimpin, USAID menggunakan promosi demokratisasi menuju ke arah liberalisasi sebagai model kebijakan demokratisasi yang baru padahal Afghanistan sebagai negara sudah memiliki identitas ideal demokrasi yang terbatas karena ideologi dan cara berpikir Islam yang sudah ditanamkan sejak Taliban mengambil alih negara ini dari Uni Soviet (Hill, 2010, p. 157).

Di jaman Pemerintahan Obama, USAID memiliki konsepsi strategi tersendiri dalam mengembangkan proses institusionalisasi berdemokrasi dengan mencoba mentransformasikan dan menggabungkan identitas kultur di Afghanistan ke arah yang lebih modern (Hill, 2010, p.160). Sementara itu, Obama lewat kebijakan luar negerinya memprioritaskan terlebih dahulu kehidupan warga Afghanistan yang terdampak akibat akumulasi perang dan konflik akibat invasi yang berlangsung sehingga mengedepankan proses rekonstruksi dan mencoba memasuki tahap perjanjian damai dengan Taliban. Urgensi Amerika Serikat dalam mendukung kebijakan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan juga didukung oleh tanggung jawab moral AS akibat invasi yang dilakukan dengan banyaknya korban tewas akibat kekerasan (Mohd Saleem et al., 2021).

Dampak kemiskinan yang melanda Afghanistan di era Obama sifatnya juga struktural menjadikan Afghanistan secara global mendapat efek bencana yang langsung berdampak pada penurunan kualitas kesejahteraan populasi warganya (Bowden et al., 2022). Penyakit dan dampak yang dirasakan warga Afghanistan akibat invasi antara lain:

1. Lebih dari setengah populasi warga Afghanistan menderita depresi, kecemasan, dan *post-traumatic stress disorder (PTSD)*.
2. 34.5% imigran dari Afghanistan mengalami penyakit psikologi.
3. Kurangnya badan dan institusi kesehatan mental yang membantu masyarakat keluar dari penyakit kesehatan mental.

Saat Presiden Obama menjabat, Presiden Hamid Karzai dari Afghanistan memimpin diiringi dengan ketidakhadirannya rekonsiliasi politik dengan Taliban sehingga strategi bantuan luar negeri di jaman Presiden Obama masih mengikutsertakan *Afghan National Security* dan Militan Lokal Afghanistan untuk bekerjasama dalam alokasi bantuan kemanusiaan. Hal ini berimplikasi terhadap bantuan yang datang dari USAID dimana Afghanistan di rentang tahun 2009-2012 mendapat bantuan sebesar \$55 Miliar dimana angka ini melampaui 7x lebih besar daripada *Government Revenue* Afghanistan di periode pemerintahan 2009-2012 (Waldman, 2013).

Dalam melihat kebutuhan warganya, Afghanistan juga bergerak menggenjot sektor agrikultural sehingga USAID di jaman Obama mengeluarkan lebih dari \$150 Juta tambahan dana untuk kebijakan program agrikultural di Helmand dan Kandahar (Waldman, 2013, p.834). Dengan kondisi tersebut, usaha dari aktor-aktor internasional untuk membantu Afghanistan harus melibatkan negosiasi dengan Taliban untuk melancarkan progress rekonstruksi karena Taliban selama invasi juga menempatkan pasukan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang menyulitkan pasokan bantuan untuk dialokasikan termasuk di sektor agrikultural (Tharwani et al., 2022). Hal ini membuat Amerika Serikat selama proses

rekonstruksi di Afghanistan, telah menghabiskan dana lebih banyak dibandingkan dana yang digelontorkan untuk kebijakan penting AS lainnya seperti “*Marshall Plan*” (Awotona, 2019). Dana bantuan dari Amerika Serikat digunakan antara lain untuk:

1. Integrasi ulang untuk menjadikan mantan kombatan perang menjadi sumber daya manusia (SDM) yang lebih produktif dalam mendukung pemulihan ekonomi negara.
2. Menciptakan sistem hukum yang lebih berkeadilan dengan mengedepankan penguatan terhadap institusi dan badan pemerintahan yang lebih demokratis serta mempromosikan hak asasi manusia (HAM).
3. Menyediakan layanan seperti air bersih, sanitasi yang layak, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, dan membangun jalan yang rusak.
4. Mempromosikan kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta menciptakan keamanan di tiap wilayah.

Di era Pemerintahan Obama, tujuan utama Amerika Serikat adalah melindungi AS dari serangan yang pernah dilancarkan Al-Qaeda dimana ini selaras dengan menghapus akses bagi Taliban untuk berkuasa dengan mengalahkan mereka melalui kekuatan militer di Afghanistan. Namun usaha menumpas Taliban secara keseluruhan di jaman Obama menjadi lebih kompleks dan sulit dikarenakan Al-Qaeda di periode pemerintahan Obama malah memindahkan pusat kepemimpinannya ke Pakistan sehingga membuat Taliban yang ada di Afghanistan memisahkan diri secara ideologi politiknya tersendiri sehingga Obama juga mengalami dilema moralitas untuk mempertahankan objektif invasi AS ke

Afghanistan (Waldman, 2013, p.835). Keputusan Obama untuk merespons ini menguatkan narasi dan pesan untuk memprioritaskan kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat dengan begitu Presiden Obama menjadikan kebijakan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan di periode pertama kepemimpinannya sebagai keputusan yang banyak dipengaruhi oleh pertimbangan reputasinya sebagai Presiden Amerika Serikat yang menaruh perhatian serius terhadap strategi keamanan Amerika Serikat (Waldman, 2013, pp.835). Hal ini menjadi penting melihat situasi politik Afghanistan yang mengalami ketidakefektifan akibat banyak campur tangan internasional khususnya invasi dari Amerika Serikat membuat terhambatnya situasi ekonomi seperti investor yang sulit masuk sehingga menyebabkan investasi dalam negeri dan luar negeri menjadi lambat sehingga membuat Presiden Obama memprioritaskan kebijakan keamanan (Mukti, 2022).

Tentunya perdamaian adalah aspek penting bagi keberlangsungan hidup warga Afghanistan yang telah lebih dari 30 tahun sejak Invasi Uni Soviet berada di tengah-tengah konflik (Crew.D Robert and Tarzi Amin, 2009). Di era Presiden Obama, perang juga tidak hanya merusak infrastruktur bangunan-bangunan di Afghanistan melainkan juga memberikan imbas terhadap roda perekonomian negara tersebut karena berbagai serangan militer yang masuk (Gates & Roy, 2015). Berdasarkan statistik dari *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) korban jiwa akibat perang di awal operasi militer AS memakan 2,375 korban jiwa (Crawford, 2016). Hal ini membuat bantuan internasional yang mengucur ke Afghanistan dari Amerika Serikat dan sekutu merupakan tanggung jawab dari entitas negara-negara donor untuk membangun pemerintah demokratis

yang lebih kuat di Afghanistan agar tercipta harapan bagi warga Afghanistan untuk mencapai perdamaian dan keluar dari pengaruh Taliban secara menyeluruh (Burgan, 2009).

Pada akhirnya, ketika rekonstruksi Afghanistan berlangsung dengan memanfaatkan bantuan internasional yang datang, fokus utama pembangunan Pemerintahan Obama terletak pada pembangunan infrastruktur yang sebelumnya rusak seperti sekolah-sekolah, proyek irigasi, saluran air, fasilitas kesehatan, dan sebagainya yang relevan dengan peningkatan kesejahteraan warga Afghanistan dibarengi dengan keamanan agar alokasi bantuan luar negeri dapat lancar dijalankan (Joseph, 2014, p.49).

2.4.3 Kebijakan USAID (*United States Agency for International Development*) dan UNAMA (*United Nations Assistance Mission in Afghanistan*) Era Presiden Donald Trump

Permasalahan utama Afghanistan di jaman Trump masih seputar keamanan karena Afghanistan masih dikategorikan sebagai negara rawan konflik tertinggi di dunia melihat jumlah permasalahan dan *cost* politik konflik yang mengakibatkan korban jiwa bagi masyarakat Afghanistan itu sendiri sehingga membuat negara ini masih sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menunjang karena alokasi dana untuk militer masih terlampau tinggi demi memastikan keamanan negara (Miller, 2019). Karena menurut data dari *UN Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA), pada awal tahun 2019 terdapat 1,366 korban jiwa tewas dan 2,446 mengalami luka-luka dan cedera karena serangkaian serangan teroris utamanya dari Taliban yang berjumlah 113 kejadian di awal tahun 2019 (Dadabaev, 2020). Hal ini

yang membuat Pemerintahan Trump masih sulit untuk mempercayai Taliban untuk patuh terhadap negosiasi agar menghentikan segala kebijakan dan operasi yang membahayakan warganya (Miller, 2019, p.6). Tentunya ini menjadi hambatan besar untuk membuat Afghanistan bisa lepas dari invasi karena umumnya proses perdamaian dapat dicapai jika negara itu dapat memimpin dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik tanpa intervensi dari aktor-aktor luar negara dimana Afghanistan belum memenuhi syarat penting tersebut (Dadabaev, 2020, p.8).

Sementara itu, terkait USAID, Presiden Trump mengalokasikan anggaran bantuan sebesar \$22,3 Miliar dalam mendukung objektif *state building* ke seluruh dunia (Boot et al., 2016). Spesifik terkait bantuan luar negeri Amerika Serikat ke Afghanistan di jaman Trump, pendekatan untuk *state building* tidak jauh berbeda dengan Presiden Obama. Hal ini dapat dilihat dari *statement* Donald Trump di awal kepemimpinannya ketika berbicara mengenai strategi baru Amerika Serikat di Afghanistan dan Asia Selatan lewat pidatonya di Gedung Putih: “*A core pillar of our new strategy is a shift from a time-based approach to one based on conditions. Further another fundamental pillar of our new strategy is the integration of all instruments of American power—diplomatic, economic, and military—toward a successful outcome*” (The White House, 2021). Hal ini membuktikan bahwa model kebijakan bantuan luar negeri Presiden Donald Trump kurang lebih sama dalam menggunakan diplomasi ekonomi dan kekuatan militer untuk mengalokasikan bantuan luar negeri ke Afghanistan.

Sementara itu, kebijakan bantuan luar negeri era Presiden Trump mengesampingkan pengaruh Pemerintahan Afghanistan dibawah kepemimpinan

Ashraf Ghani dimana Trump mengindikasikan bahwa AS tidak akan mencampuri urusan internal Pemerintahan Afghanistan lagi baik dalam segi menumbuhkan proses demokrasi sebagaimana yang dilakukan pendahulunya di jaman Presiden George W. Bush dan Presiden Barack Obama sehingga keputusan Trump ini diindikasikan sebaga *counterproductive policy* dari keberlanjutan kebijakan di dua era Presiden sebelumnya (Felbab-brown, 2017).

Kebijakan untuk mengurangi intensitas intervensi ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan besar karena di lain sisi, AS masih menginginkan percepatan pertumbuhan ekonomi di Afghanistan namun hal ini akan sulit tercapai jika pemanfaatan bantuan luar negeri tersebut masih bergantung pada keamanan dan level kualitas Pemerintah Afghanistan yang masih buruk terutama pada sektor infrastruktur dan konektivitas antar daerah yang masih sulit untuk terciptanya perkembangan alur perdagangan dan transaksi ekonomi sehingga dengan mengecilkan pengaruh kekuatan Presiden Ghani di Kabul, Presiden Trump justru membuka peluang Taliban untuk masuk dalam sistem kekuasaan yang masih buruk dan justru akan menimbulkan tumbuhnya ancaman yang nyata (Felbab-brown, 2017, p.14).

Gestur politik Trump dalam memahami isu di Afghanistan diinterpretasikan sebagai sikap luar negeri AS di jamannya yang ingin semakin menjauhi AS dari peranannya sebagai *global leader* misalnya dari inisiatif Trump yang ingin menghentikan perang Afghanistan sesegera mungkin (Miller, 2019). Kebijakan Trump ini ia lakukan khususnya menimbang aspek tekanan publik Amerika yang tidak lagi menganggap bahwa invasi ke Afghanistan layak dilakukan karena selama

hampir 20 tahun invasi di jaman Trump, pengeluaran Amerika Serikat banyak tergerus khususnya pada anggaran bantuan militer ke Afghanistan yang telah memakan lebih dari 2 Triliun Dolar AS (Masta, 2022).

Bahkan semenjak 2017, Afghanistan menjadi salah satu dari 5 negara di Timur Tengah selain Iraq, Israel, Jordania, dan Mesir sebagai negara penerima bantuan luar negeri terbesar dari Amerika Serikat melalui *U.S. Agency for International Development* (USAID) yang menurut statistik di tahun 2017 telah mengestimasi anggaran \$20,55 Miliar untuk alokasi anggaran bantuan luar negeri ke seluruh dunia (Tarnoff & Lawson, 2019).

Presiden Trump memahami bahwa bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat di daerah tinggi konflik akibat terorisme seperti Taliban memiliki salah satu tujuan untuk menerapkan *counterterrorism* (Boutton, 2019). Hal ini jika dilihat dengan tindakan kebijakan luar negeri Pemerintah Trump, dapat relevan karena sikap luar negeri AS di jamannya yang melakukan inisiatif dialog dan negosiasi dengan Taliban sebagai salah satu proses Amerika Serikat untuk menghentikan invasi secara keseluruhan. Mempertimbangkan Taliban dalam proses alokasi bantuan luar negeri dan dimensi keterkaitan antara bantuan kemanusiaan dan intervensi perdamaian di Afghanistan memang sejalan dijalankan untuk menghendaki *engagement* lebih kuat dengan masyarakat sipil (Weigand & Andersson, 2019).

2.5 Kesimpulan

Invasi Amerika Serikat ke Afghanistan di era tiga pemerintahan (Pemerintahan George W. Bush, Pemerintahan Barack Obama, dan Pemerintahan Donald Trump) menyebabkan kemiskinan dan konflik berkepanjangan di Afghanistan. Aktor rentan seperti wanita, anak-anak, dan warga kelas bawah menjadi subjek paling vital untuk mendapat perhatian karena dampak perang melawan Taliban menyebabkan kerusakan di sektor-sektor penting Afghanistan antara lain: agrikultur, pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan sosial, dan aspek integral kehidupan warga Afghanistan lainnya.

Eksistensi Taliban sebagai faksi berpengaruh di Afghanistan juga menyebabkan Afghanistan rentan akan pengaruh terorisme. Penumpasan terorisme di lain sisi merupakan objektif utama Amerika Serikat sejak 2001 untuk menempatkan operasi militer skala besar yang menghabiskan dana perang lebih dari \$2 Triliun sampai invasi dihentikan di jaman Pemerintahan Joe Biden. Pada akhirnya, Afghanistan adalah negara yang dapat dikategorikan sebagai *failed and fragile states* sehingga membuat bantuan kemanusiaan ke negara ini menjadi aspek penting untuk pemenuhan kebutuhan hidup warga Afghanistan.

USAID (*United States Agency for International Development*) dan UNAMA (*United Nations Assistance Mission in Afghanistan*) adalah dua aktor non-negara sebagai mitra kerjasama Amerika Serikat untuk menyalurkan bantuan luar negeri. Hal ini disebabkan karena ketiga pemerintahan selama invasi memiliki sikap yang sama bahwa bantuan kemanusiaan harus disalurkan melalui pihak ketiga karena kasus korupsi birokrasi pemerintahan Afghanistan masih tinggi ditambah

eksistensi Taliban yang kerap menggagalkan alur bantuan kemanusiaan yang masuk.